

# The Effectiveness of the SIKS-NG Application in Improving the Quality of Poverty Data Management in Sidokare Subdistrict, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency

## [Efektivitas Aplikasi SIKS-NG Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Kemiskinan di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo]

Aditya Prasetyo<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Penulis Korespondensi: [lailulmursyidah@umsida.ac.id](mailto:lailulmursyidah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effectiveness of the SIKS-NG application in improving poverty data management in Sidokare Sub-district and to identify its supporting and inhibiting factors. The research employed a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted through the stages of collection, reduction, presentation, and conclusion. Referring to Steers' (2015) effectiveness indicators, this study highlights three aspects: goal achievement, integration, and adaptation. The findings reveal that SIKS-NG provides more valid and accurate social welfare data, supports operators in data entry, updates, verification, and validation, and enables citizens to check assistance status and register for programs. Supporting factors include the presence of dedicated operators, while inhibiting factors involve unsynchronized verification schedules, system disruptions, limited proposal information, and delays in new procedures.*

**Keywords** - effectiveness, application, SIKS-NG, quality of data management, poverty

**Abstrak..** *Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teori efektivitas Steers (2015), penelitian ini menekankan tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan SIKS-NG mampu menghasilkan data kesejahteraan sosial yang lebih valid dan tepat sasaran, mendukung peran operator dalam input, pembaruan, serta verifikasi dan validasi data, serta memfasilitasi masyarakat dalam pengecekan status dan pendaftaran bansos. Faktor pendukungnya adalah adanya operator khusus di kelurahan, sedangkan hambatannya mencakup jadwal verifikasi yang tidak sesuai, gangguan sistem, keterbatasan informasi usulan, dan keterlambatan prosedur baru.*

**Kata Kunci** – Efektivitas Aplikasi, SIKS-NG, Kualitas Pengelolaan Data, Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

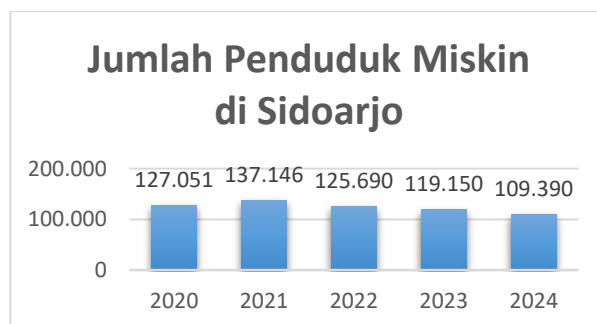
Database kemiskinan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi salah satunya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS berfungsi sebagai basis data utama yang memuat informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial, program pemberdayaan, serta penerima bantuan sosial (bansos). Selain itu, DTKS juga mencatat potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah. DTKS disediakan untuk keluarga miskin dan rentan di seluruh wilayah di Indonesia. Data ini diaplikasikan untuk menetapkan penerima berbagai program bantuan sosial yang meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dampak dari terdapatnya masyarakat dalam DTKS yaitu merupakan syarat awal bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan yang meliputi: (1) Akses Bantuan Langsung Tunai, yaitu bantuan tunai untuk keluarga miskin, (2) Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan reguler bagi keluarga dengan anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, (3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan, (4) Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu bantuan pendidikan untuk anak sekolah, (5) Kartu Indonesia Sehat (KIS), yaitu akses layanan kesehatan gratis, dan (6) Kartu Prakerja, yaitu program pelatihan dan insentif untuk pencari kerja dan wirausahawan [1]. Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) mempunyai hubungan yang erat dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yaitu DTKS merupakan data yang berisi 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial paling rendah. SIKS-NG merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan DTKS. DTKS bisa diusulkan dengan aplikasi SIKS-NG. Data DTKS yang sudah diusulkan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial. Menteri Sosial menetapkan DTKS setiap bulannya. Tahapan dalam pengusulan DTKS dengan SIKS-NG yaitu sebagai berikut: (1) Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dengan lengkap ke Pengisi Data SIKS-NG, (2) Pengisi Data SIKS-NG melakukan pengecekan data pemohon, (3) Pengisi Data SIKS-NG mewawancarai pemohon terkait survey kriteria pengusulan DTKS, (4) Pengisi Data SIKS-NG melakukan pengolahan usulan DTKS, dan (5) Pengisi Data SIKS-NG melakukan penyimpanan dan pengarsipan berkas pemohon dan dokumen pergesahan DTKS [2]

Kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana timbul ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan primer berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa angka kemiskinan nasional ada di angka 9,36% [3]. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, namun capaian target belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya menuju target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 masih menghadapi tantangan besar karena jumlah absolut penduduk miskin masih cukup tinggi[3]. Menurut Bank Dunia, kemiskinan bukan sekadar kekurangan finansial, namun merupakan kondisi dimana individu atau kelompok masyarakat tidak mempunyai akses yang mencukupi terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka [4].

Sistem ini dapat diakses secara online oleh Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengelolaan Data Terpadu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan koordinasi Kementerian Sosial serta dukungan dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan berjalan secara akurat, terkini, dan terintegrasi. Mekanisme pelaporan pendaftaran maupun perubahan data dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga ke Kementerian Sosial. Data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi kemudian ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu nasional. Selanjutnya, data ini digunakan oleh kementerian maupun lembaga terkait dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variabel yang sesuai dengan formulir Basis Data Terpadu, sehingga penyajian informasi mengenai masyarakat miskin menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Hal ini memudahkan integrasi ke dalam Basis Data Terpadu serta mendukung implementasi berbagai program perlindungan sosial di tingkat nasional [5]

Pada Kabupaten Sidoarjo sendiri, kemiskinan masih menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah. Menurut BPS Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya yaitu Surabaya, Madiun, Malang, dan Batu [6]. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 109.390 ribu jiwa atau sebesar 4,53%, menurun 0,47 poin dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yaitu sebanyak 119.150 ribu jiwa atau sebesar 5,00% sebagaimana grafik di bawah ini :



**Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo**  
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 yaitu sebanyak 127.051 jiwa (5,59%), pada tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 137.146 jiwa (5,93%), pada tahun 2022 menurun menjadi sebanyak 125.690 jiwa (5,36%), pada tahun 2023 sebanyak 119.150 jiwa (5,00%), dan pada tahun 2024 menurun menjadi sebanyak 109.390 jiwa (4,53%). Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial. Untuk menjamin ketepatan sasaran, dilakukan pendataan dan pencatatan warga miskin ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Sosial kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendataan tersebut guna menentukan penerima bantuan dari pemerintah pusat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, proses pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota,

sebagaimana tercantum dalam pasal 8, 9, dan 10. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pemutakhiran data dilakukan oleh sumber daya kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa. Kementerian Sosial berperan sebagai pihak yang menetapkan data, bukan sebagai pelaksana langsung di lapangan [7].

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kegiatan verifikasi dan validasi data warga miskin wajib dilakukan secara berkala, minimal dua tahun sekali. Efektivitas program pemutakhiran data sangat bergantung pada pelaksanaan yang optimal oleh Dinas Sosial serta Pemerintah Desa/Kecamatan. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, verifikasi data didefinisikan sebagai proses pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin keakuratan dan kebenaran data. Mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) penyusunan daftar awal sasaran, (2) pelaksanaan bimbingan teknis, (3) musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, (4) kunjungan langsung ke rumah tangga miskin, (5) pengelolaan data, (6) pengawasan dan pemeriksaan, serta (7) penyusunan laporan. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang tercantum dalam DTKS benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat miskin di lapangan [7]. Sesuai isi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin secara berkala minimal dua tahun sekali [8].

Aplikasi SIKS-NG merupakan salah satu bentuk produk inovasi dalam rangka penanganan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo [9]. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data kesejahteraan sosial secara berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi informasi. Melalui sistem ini pula, perubahan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dilakukan. Hasil pemeriksaan dan pengesahan penghapusan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi melalui SIKS-NG. Dinas sosial daerah provinsi memeriksa dan menyetujui penghapusan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan dan menyampaikan ke Kementerian Sosial melalui SIKS-NG.

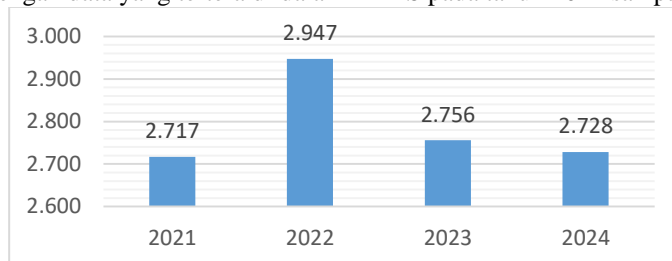
Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi manajemen yang digunakan untuk mengolah data kemiskinan dan mengusulkan data baru Basis Data Terpadu (BDT). Aplikasi SIKS-NG berperan penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Kualitas data aplikasi SIKS-NG secara langsung berdampak pada efektivitas dan kualitas informasi. Kualitas data aplikasi SIKS-NG dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu melaksanakan perbaikan data geotagging dan foto koordinat sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi SIKS mobile dan melaksanakan pengecekan data di aplikasi SIKS mobile dengan data di KTP dan KK [10].

Dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG, di setiap desa/kelurahan dipilih operator yang mampu mengoperasikan aplikasi SIKS/NG. Tugas operator desa/kelurahan yaitu melakukan penginputan data masyarakat miskin. Data yang diinput melalui aplikasi SIKS-NG selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Aplikasi ini juga digunakan sebagai media untuk melakukan pembaruan data serta pengusulan data baru bagi masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial sesuai kategori yang tersedia dalam sistem [11]. Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu data induk yang berisi informasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Aplikasi ini berperan sebagai sarana manajemen dalam proses pengusulan data baru maupun pembaruan pada Basis Data Terpadu (BDT), sehingga dapat mendukung berbagai program layanan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial [11]. Kementerian Sosial menerapkan sistem satu data terpadu nasional melalui aplikasi SIKS-NG untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berjalan secara tepat sasaran. Keberadaan DTKS berfungsi sebagai instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diimplementasikan secara sistematis di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Sidoarjo [12].

Sebelum diimplementasikannya aplikasi SIKS NG di Kabupaten Sidoarjo, seluruh kelurahan di Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pendataan bantuan sosial secara manual. Pendataan dimulai dari laporan RT kemudian laporan tersebut dikumpulkan dan dilaporkan kepada Kelurahan Sidokare. Kemudian Kelurahan Sidokare mengajukan data tersebut pada pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Pelaporan bantuan sosial dengan cara manual dan proses yang cukup panjang tersebut sangat rawan dengan permasalahan seperti terjadinya data ganda seperti masih terdaftarnya nama masyarakat yang sudah meninggal dan banyak masyarakat yang mampu namun masih mendapat bantuan, dan lain sebagainya.

Setelah diimplementasikannya aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Sidoarjo, Proses pemutakhiran data dilaksanakan dengan memanfaatkan e-government melalui aplikasi *Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System* (SIKS-NG-GIS). Aplikasi ini menyediakan sejumlah fitur seperti *view DTKS*, *rekap DTKS*, *verifikasi*, *usulan baru*, *perbaikan data*, dan *data usulan dibatalkan*. Verifikasi dan validasi data dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2006, khususnya pada Bab II Pasal 2 yang

mengatur tata cara pelaksanaannya. Implementasi SIKS-NG menjadi hal krusial dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta sebagai sarana pemantauan kondisi sosial ekonomi masyarakat oleh pemerintah. Namun terdapat beberapa kendala yang sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG yaitu kurang maksimalnya aplikasi saat melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [13]. Berikut ini adalah data kemiskinan di Kelurahan Sidokare sesuai dengan data yang tertera di dalam DTKS pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 :



**Gambar 2.** Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan Sidokare  
Sumber : DTKS (2024)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk miskin di Kelurahan Sidokare pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.717 orang, pada tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 2.947 orang, pada tahun 2023 menurun menjadi 2.756 orang, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 2.728 orang. Penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan tepat untuk menjamin keefektifan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sidokare. Menurut Steers dalam Purnamawati, Suyeno, & Anadza (2022), efektivitas merupakan sejauh mana suatu program dapat mencapai tujuan dan sasarnya sebagai suatu sistem, dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana secara optimal tanpa menimbulkan tekanan atau hambatan yang berlebihan dalam proses pelaksanaannya. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan suatu organisasi dalam mengimplementasikan fungsi, tugas, atau program secara lancar dan tanpa ketegangan internal [14]

Efektivitas aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare bisa dilihat sebagai hasil implementasi dari e-government untuk meningkatkan keadaan kesejahteraan sosial masyarakat yang pada umumnya mencakup keadaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup [15]. Aplikasi SIKS-NG memberikan manfaat nyata dalam bidang kesejahteraan sosial, khususnya bagi Kelurahan Sidokare. Melalui aplikasi ini, pengajuan usulan bagi warga tidak mampu dapat dilakukan secara lebih mudah dan sesuai kebutuhan. Penggunaannya di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh operator khusus, di mana warga cukup membawa dokumen pendukung, seperti Kartu Keluarga, untuk mengajukan usulan atau memeriksa data secara berkala. Kehadiran SIKS-NG diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) [8]. Efektivitas program aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare tercermin dari kemampuannya dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. Melalui proses verifikasi dan validasi, data tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam penanganan kemiskinan. Aplikasi ini juga memfasilitasi pembaruan data langsung dari lapangan, yang selanjutnya digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, serta penyaluran bantuan dan subsidi secara tepat sasaran [12].

Kondisi eksisting efektivitas SIKS-NG dalam pengelolaan data di Kelurahan Sidokare menunjukkan bahwa sistem ini belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya sebagai alat bantu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala teknis dan administratif yang menghambat efektivitas sistem. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara jadwal verifikasi faktual yang ditetapkan dengan tampilan aplikasi, di mana dashboard SIKS-NG tidak selalu dapat diakses secara konsisten oleh petugas. Selain itu, saat dilakukan pengusulan data, sering kali muncul ketidakepatan informasi, bahkan usulan yang telah diinput dapat hilang tanpa penjelasan. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hasil, karena petugas kesulitan mengetahui apakah data yang diusulkan diterima atau tidak, sehingga mereka harus melakukan pengecekan manual ke lembaga terkait, seperti helpdesk BPJS untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ditambah lagi, prosedur dan daftar program baru yang sering terlambat disampaikan ke tingkat kelurahan membuat para petugas mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengoordinasikan pengusulan. Keseluruhan situasi ini mencerminkan bahwa efektivitas sistem SIKS-NG di Kelurahan Sidokare masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknologi, koordinasi, maupun alur komunikasi birokrasi. Fenomena di atas merupakan permasalahan yang terjadi terkait pengolahan data. Pengolahan data itu sendiri menurut George R. Terry dalam [16] merupakan serangkaian proses atau operasi terhadap informasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan relevansi yang kuat dengan fokus penelitian ini. Penelitian oleh Haromin dan Andriyansah (2022) berjudul *"Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi*

*Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung"* [12] menyimpulkan bahwa penerapan SIKS-NG cukup efektif dalam mendukung pendistribusian bantuan sosial. Efektivitas tersebut dilihat dari beberapa aspek, antara lain adaptasi, pencapaian tujuan, dan integrasi. Dari sisi adaptasi, SIKS-NG dinilai mudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Dalam hal pencapaian tujuan, bantuan yang disalurkan melalui aplikasi ini sudah mengacu pada data masyarakat miskin, namun masih terdapat kendala karena proses pendataan belum sepenuhnya dilakukan secara langsung di lapangan. Sementara dari sisi integrasi, proses sosialisasi program dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan perangkat desa seperti Kepala Dusun, RW, dan RT agar informasi dapat tersebar secara merata. Selanjutnya, penelitian oleh Setya dan Sarurama (2024) yang berjudul *"Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara"* menunjukkan bahwa pelaksanaan SIKS-NG dalam pengelolaan DTKS berjalan secara efektif. Sistem ini mampu mengelola data secara terstruktur dan mendukung proses perencanaan serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini memperkuat bahwa penggunaan SIKS-NG sebagai bagian dari e-government memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial [17]. Hasil penelitian Ramadan, Nurlatifah, Shagadah, Ginanjar, & Santa (2024) dengan judul "Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk Pengajuan DTKS" [8] menyatakan bahwa SIKS-NG diimplementasikan untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan data kesejahteraan sosial, termasuk data fakir miskin dan orang tidak mampu di Kelurahan Cisaranten Wetan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas maka terdapat novelty research/kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo serta tidak ada yang menggunakan lokasi penelitian di Kelurahan Sidokare dengan menggunakan informan yaitu Operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare dan user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo dan (2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG dengan menggunakan dimensi efektivitas menurut Steers (2015), yang mencakup tiga indikator utama: (1) Pencapaian tujuan, yaitu kemampuan individu atau organisasi dalam merealisasikan hasil maupun target yang telah ditetapkan; (2) Integrasi, yakni penyatuan berbagai elemen, proses, atau sistem ke dalam satu kesatuan yang saling berkaitan; dan (3) Adaptasi, yaitu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan maupun situasi yang terjadi [18].

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling [19]. Key Informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang Operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare dan 2 orang warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini memiliki langkah-langkah yaitu: (1) Pengumpulan Data. Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, (2) Reduksi Data. Data-data yang sudah didapatkan akan dipilih untuk disesuaikan dengan rumusan masalah, (3) Penyajian Data. Data yang didapatkan saat wawancara di Kelurahan Sidokare mulai disajikan sesuai dengan rumusan masalah, dan (4) Kesimpulan. Penulis memberikan beberapa kesimpulan kecil sebelum menuliskan kesimpulan akhir secara jelas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Aplikasi SIKS-NG Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Kemiskinan di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo.

#### 1. Pencapaian Tujuan

Dalam konteks penerapan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) di tingkat kelurahan, istilah "pencapaian tujuan" merujuk pada keberhasilan sistem dalam mencapai indikator efektivitas utama yang berkaitan dengan data kemiskinan: yaitu ketepatan sasaran, akuntabilitas, validitas data, serta waktu penyaluran yang efisien. Pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu dengan diterapkannya SIKS-NG maka harapannya adalah data kesejahteraan sosial menjadi valid dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare sebagai berikut:

*“Dengan adanya SIKS-NG ini harapannya adalah data kesejahteraan sosial menjadi valid dan tepat sasaran. Terdapat beberapa menu yang digunakan dalam pendataan meliputi view DTKS, rekap DTKS, verifikasi, data usulan dibatalkan, usulan baru dan perbaikan data”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Pernyataan dari operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare di atas didukung oleh pernyataan dari user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

*“Ketepatan dalam menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan penting untuk menjamin efektivitas program penanggulangan kemiskinan”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Kedua pernyataan di atas juga senada dengan pernyataan dari warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat sebagai berikut:

*“Harapan saya aplikasi SIKS-NG dapat dipergunakan seefektif mungkin untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat, seperti kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare, user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat di atas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu dengan diterapkannya SIKS-NG maka harapannya adalah data kesejahteraan sosial menjadi valid dan tepat sasaran. Berikut ini adalah perbandingan data DTKS di SIKS-NG yang terekap dan terverifikasi serta data usulan yang dibatalkan pada Kelurahan Sidokare.

**Tabel 1.** Perbandingan Data DTKS di SIKS-NG yang Terekap dan Terverifikasi serta Data Usulan yang Dibatalkan di Kelurahan Sidokare

Keterangan	Jumlah
Rekap DTKS Jumlah Individu	2.659
Rekap DTKS Perlu Perbaikan	7
Total Seluruh Data Verifikasi Usulan	138
Total Data Sudah Diverifikasi	0
Total Data Belum Diverifikasi	138
Data yang Pernah Diusulkan lalu Dibatalkan	101
Total Penerima Bansos	1.619 KPM

Sumber : Kelurahan Sidokare (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 2.659 orang individu dalam rekap DTKS dengan jumlah yang memerlukan perbaikan sebanyak 7 orang. Total seluruh data verifikasi usulan yaitu sebanyak 138 data yang seluruhnya belum diverifikasi, sedangkan data yang pernah diusulkan lalu dibatalkan yaitu sebanyak 101 data. Perbedaan antara data yang terekap, terverifikasi, dan usulan yang dibatalkan dalam SIKS-NG sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pengelolaan DTKS yaitu meliputi : (1) Ketidakesesuaian data administratif. Data usulan yang tidak sesuai dengan data kependudukan, seperti NIK yang tidak valid atau tidak terdaftar di Dispendukcapil, dapat menyebabkan usulan tersebut ditolak atau dibatalkan. Selain itu, perbedaan antara data yang diinput dengan dokumen pendukung, seperti foto rumah atau KTP, juga dapat menjadi alasan penolakan, (2) Kurangnya pemutakhiran data oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang tidak secara rutin memperbarui data DTKS dapat menyebabkan data yang terekap tidak mencerminkan kondisi aktual masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan individu yang tidak lagi memenuhi syarat tetap tercantum dalam DTKS, sementara yang seharusnya masuk justru terlewatkan, (3) Kesalahan teknis dalam aplikasi SIKS-NG. Masalah teknis dalam aplikasi SIKS-NG, seperti data ganda atau ID BDT yang tidak ditemukan dalam data prelist, dapat menyebabkan data usulan ditolak atau tidak diproses dengan benar. Kesalahan ini sering kali memerlukan intervensi manual untuk perbaikan, (4) Proses verifikasi dan validasi yang tidak optimal. Verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh petugas di tingkat desa atau kelurahan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan data yang seharusnya valid menjadi tidak valid, atau sebaliknya. Kurangnya pelatihan atau pemahaman tentang prosedur yang benar dapat berkontribusi pada masalah ini, (5) Keterbatasan kuota dan kebijakan program. Dalam beberapa kasus, usulan yang sebenarnya valid ditolak karena melebihi kuota yang tersedia untuk program bantuan tertentu. Kebijakan penetapan kuota ini dapat menyebabkan perbedaan antara data yang terekap dan data yang akhirnya disetujui, (6) Perubahan status sosial ekonomi penerima. Perubahan kondisi sosial ekonomi individu, seperti peningkatan pendapatan atau status pekerjaan, dapat menyebabkan mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Jika perubahan ini tidak segera diperbarui dalam sistem, data yang terekap bisa menjadi tidak akurat, (7) Ketidakesesuaian antara data SIKS-NG dan data bank penyalu. Perbedaan data antara SIKS-NG dan data yang

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

dimiliki oleh bank penyalur bantuan dapat menyebabkan masalah dalam penyaluran bantuan, seperti saldo nol atau bantuan tidak cair. Hal ini sering kali disebabkan oleh perbedaan data identitas atau rekening penerima, dan (8) Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data DTKS dapat menyebabkan inkonsistensi data. Misalnya, data yang telah diperbarui di tingkat daerah tidak segera terintegrasi ke dalam sistem pusat, menyebabkan perbedaan antara data yang terekap dan data yang terverifikasi.

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa data jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di SIKS-NG dan menerima program bansos (bantuan sosial) di Kelurahan Sidokare yaitu sebanyak 1.619 orang yang terdiri dari: (1) PKH (Program Keluarga Harapan) sebanyak 151 keluarga penerima manfaat, (2) PBI-D (Penerima Bantuan Iuran Daerah) BPJS Kesehatan sebanyak 1.323 keluarga penerima manfaat, dan (3) Bantuan Pangan Beras sebanyak 145 keluarga penerima manfaat. Ketepatan dalam menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan penting untuk menjamin keefektifan program penanggulangan kemiskinan. Efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sidokare dapat dilihat sebagai hasil implementasi e-government untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang pada umumnya meliputi kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup.

Hal ini sesuai dengan teori menurut Steers (2015) [18] Pencapaian tujuan merujuk pada kemampuan individu maupun organisasi dalam mewujudkan hasil yang diinginkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan sejauh mana upaya yang dilakukan dapat menghasilkan capaian yang sesuai bahkan melebihi ekspektasi. Pencapaian tujuan dipandang sebagai sebuah proses yang membutuhkan tahapan, baik dalam bentuk pencapaian bagian-bagian tertentu maupun melalui periodisasi waktu. Dengan demikian, pencapaian tujuan meliputi sasaran yang bersifat konkret dan terukur sebagai bentuk realisasi dari target yang telah direncanakan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Setya & Sarurama (2024) dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara” [17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses efektivitas SIKS-NG dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah berjalan dengan baik. Efektivitas tersebut dinilai melalui dimensi tujuan, adaptasi, dan integrasi dalam mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG mampu meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi dalam pengelolaan DTKS, khususnya pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di tingkat kabupaten. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mengoperasikan aplikasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan yaitu dengan diaplikasikannya SIKS-NG maka diharapkan data kesejahteraan sosial menjadi valid dan tepat sasaran.

## 2. Integrasi

Dalam penerapan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) di kelurahan, integrasi merujuk pada penyatupaduan data dan sistem yang memungkinkan pengelolaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) secara lintas lembaga dan tingkat pemerintahan. Rathore dan Sonawat dalam Ramaila & Molwele (2022) [20] mendefinisikan integrasi teknologi sebagai akses ke berbagai alat digital yang memungkinkan operator menerapkan keterampilan teknologi untuk terlibat dengan konten untuk pemahaman yang lebih dalam dan memecahkan masalah. Lebih lanjut, menurut Dockstader dalam Yaumi & Damopolii (2019) [21] integrasi teknologi adalah menggunakan komputer secara efektif dan efisien dalam bidang konten secara umum untuk mengarahkan operator menerapkan keterampilan komputer dengan cara yang berarti. Keberhasilan penerapan integrasi teknologi memerlukan ketersediaan alat digital.

Integrasi teknologi adalah penggunaan sumber daya teknologi komputer dan perangkat seluler seperti smartphone, aplikasi perangkat lunak, dan internet dalam praktik sehari-hari dan dalam pengelolaan aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare. Integrasi teknologi yang berhasil dicapai ketika penggunaan teknologi rutin dan transparan, mudah diakses dan siap sedia untuk tugas yang sedang dikerjakan, dan membantu mencapai tujuan secara efektif. Pengintegrasian teknologi bertujuan untuk membangun “*knowledge-based society habits*” pada operator SIKS-NG seperti kemampuan mencari, mengolah/mengelola informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Integrasi teknologi juga mengembangkan ketrampilan menggunakan TIK oleh operator SIKS-NG serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan DTKS. Mengintegrasikan teknologi terdapat faktor penting yang mempengaruhi yaitu ketersediaan fasilitas atau sarana pendukung teknologi, kemampuan dalam mengintegrasikan teknologi serta karakteristik lingkungan belajar dan masyarakat di Kelurahan Sidokare.

Integrasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu aplikasi SIKS-NG mempunyai manfaat dalam kesejahteraan sosial. Dengan adanya

aplikasi ini, kelurahan dapat dengan mudah mengajukan usulan untuk masyarakat yang tidak mampu sesuai kebutuhan mereka. Hal ini disampaikan oleh operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare sebagai berikut:

*“Aplikasi SIKS-NG ini mempunyai manfaat dalam kesejahteraan sosial dimana dengan adanya aplikasi ini, kelurahan bisa mudah mengajukan usulan untuk masyarakat yang tidak mampu sesuai kebutuhan mereka. Saya selaku operator melakukan input data dan memperbarui data kemiskinan yang ada di Kelurahan Sidokare. Saya juga melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Pernyataan dari operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare di atas didukung oleh pernyataan dari user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

*“Aplikasi SIKS-NG di tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan dapat mengunjungi kelurahan dengan hanya membawa dokumen seperti KK. Sehingga diharapkan dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Kedua pernyataan di atas juga senada dengan pernyataan dari warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat sebagai berikut:

*“Aplikasi SIKS-NG di kelurahan digunakan oleh operator, saat saya mengajukan usulan atau memeriksa data secara berkala bisa dengan mengunjungi kelurahan dengan membawa KK”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare, user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat di atas dapat diketahui bahwa integrasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu aplikasi SIKS-NG mempunyai manfaat dalam kesejahteraan sosial. Dengan adanya aplikasi SIKS-NG, pihak kelurahan dapat lebih mudah mengajukan usulan terkait masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pada tingkat kelurahan, aplikasi ini dioperasikan oleh petugas khusus, sehingga masyarakat yang ingin mengajukan usulan atau memeriksa data cukup mendatangi kantor kelurahan dengan membawa dokumen pendukung, seperti Kartu Keluarga. Operator SIKS-NG kemudian melakukan input, pembaruan, serta proses verifikasi dan validasi terhadap data kemiskinan, sebagaimana yang dilakukan di Kelurahan Sidokare. Kehadiran aplikasi SIKS-NG diharapkan mampu meminimalisasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal ini sesuai dengan teori menurut Steers (2015) [18] Integrasi dipahami sebagai proses penggabungan berbagai elemen, sistem, maupun proses ke dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam kerangka efektivitas, integrasi mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengoordinasikan serta menyatukan beragam aspek atau komponen guna mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif. Melalui integrasi yang baik, setiap bagian organisasi dapat bekerja secara sinergis, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi redundansi, serta meningkatkan kolaborasi. Integrasi yang kuat juga berperan dalam membangun kesatuan visi dan tujuan, memperlancar komunikasi, serta memperkuat koordinasi dalam pencapaian hasil. Dengan demikian, integrasi dapat dijadikan ukuran terhadap kemampuan organisasi dalam melaksanakan program kerja sekaligus menjalin sosialisasi dengan pihak-pihak terkait.

Integrasi merupakan indikator penting dalam menilai kapabilitas suatu organisasi, khususnya dalam menjalin sosialisasi dan komunikasi dengan pihak lain. Dalam konteks efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare, integrasi dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan aplikasi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Ramadan, Nurlatifah, Shangadah, Ginanjar, dan Santa (2024) dengan judul *“Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk Pengajuan DTKS”* [8] yang menyatakan bahwa aplikasi SIKS-NG dapat dioperasikan oleh operator khusus yang ditunjuk langsung oleh instansi pemerintahan terkait dan diajukan ke Dinas Sosial. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data kesejahteraan sosial, termasuk data fakir miskin dan orang tidak mampu. Di tingkat kelurahan, aplikasi SIKS-NG digunakan untuk mengusulkan dan memverifikasi data warga, serta memantau apakah warga tersebut telah menerima bantuan sosial. Dengan demikian, keberadaan aplikasi ini mencerminkan bentuk kepedulian pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran melalui mekanisme yang terintegrasi.

Keberhasilan penyaluran dana kesejahteraan sosial berdampak positif terhadap masyarakat sasaran, antara lain melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan secara umum, khususnya di tingkat kelurahan. Aplikasi **SIKS-NG** yang digunakan di kelurahan berfungsi untuk mengusulkan data baru dan memeriksa status kepesertaan masyarakat dalam **DTKS**. Proses pengusulan data baru memerlukan waktu sekitar satu hingga dua bulan sejak penginputan hingga pelaksanaan **Musyawarah Kelurahan (Muskel)**. Ke depan, aplikasi SIKS-NG perlu dilengkapi dengan fitur mengenai jumlah penerima bantuan DTKS guna

mempermudah pegawai dalam melakukan pengecekan, sekaligus meminimalkan potensi **human error** pada saat pengajuan data.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa integrasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan yaitu aplikasi SIKS-NG di tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan atau memeriksa data secara berkala bisa mendatangi kelurahan dengan hanya membawa dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga. Operator SIKS-NG melakukan input data dan memperbarui data kemiskinan yang ada di Kelurahan Sidokare. Selain itu Operator SIKS-NG juga melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat Kelurahan Sidokare.

### 3. Adaptasi

Dalam konteks penerapan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) di tingkat kelurahan, adaptasi merujuk pada kemampuan individu dan organisasi lokal (terutama operator kelurahan) untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan prosedur baru yang diperkenalkan oleh sistem tersebut. Adaptasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu dengan adanya aplikasi SIKS-NG ini diyakini dapat mendata penduduk miskin secara akurat yang selanjutnya data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh Kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan dan diharapkan bantuan tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare sebagai berikut:

*“Adanya aplikasi SIKS-NG bisa mendata penduduk miskin secara akurat yang kemudian data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Mensos sebagai data terpadu yang digunakan oleh Kementerian/lembaga untuk menangani kemiskinan”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Pernyataan dari operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare di atas didukung oleh pernyataan dari user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

*“Fungsi aplikasi SIKS-NG yaitu untuk menyediakan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. Perbaikan data dari lapangan dikelola dengan SIKS-NG dan dimanfaatkan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan penyaluran bansos/subsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Kedua pernyataan di atas juga senada dengan pernyataan dari warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat sebagai berikut:

*“Data kemiskinan bisa digunakan oleh pihak terkait untuk menangani kemiskinan dan agar bantuan diberikan tepat sasaran”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare, user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat di atas dapat diketahui bahwa adaptasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare. Keberadaan aplikasi SIKS-NG diyakini mampu menghasilkan pendataan masyarakat miskin secara lebih akurat. Data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi kemudian ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu nasional yang dapat digunakan oleh kementerian maupun lembaga terkait dalam upaya penanganan kemiskinan, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Fungsi utama SIKS-NG adalah menyediakan data kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Melalui aplikasi ini, perbaikan data dari lapangan dapat dikelola secara sistematis untuk mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta penyaluran bantuan sosial atau subsidi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Berikut disajikan data pendukung yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas setelah penerapan SIKS-NG di Kelurahan Sidokare.

NIK	NIK KK	NAMA	KELOMPOK	KELURAHAN	US RW	NO RT	JANG KELURAHAN	STATUS KAKIN
3110040670000000000	3110042000000000000	AMMANI	Sidokare	Sidokare	8	12	Pemukiman	KAKIN
3110040670000000000	3110042000000000000	SILVA	Sidokare	Sidokare	8	13	Pemukiman	KAKIN
3110040670000000000	3110042000000000000	NIER KHAYATI	Sidokare	Sidokare	8	15	Pemukiman	CARA KAKIN
3110040670000000000	3110042000000000000	REHAYATI	Sidokare	Sidokare	1	2	Pemukiman	KAKIN
3110040670000000000	3110042000000000000	KARIMAH	Sidokare	Sidokare	8	21	Pemukiman	KAKIN

**Gambar 3.** Bukti Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan DTKS dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kelurahan Sidokare

Gambar di atas menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Sidokare. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial. Untuk mengecek status penerima bansos, masyarakat Kelurahan Sidokare dapat menggunakan situs [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id). Masyarakat di Kelurahan Sidokare juga dapat menggunakan SIKS-NG untuk mendaftar bansos dan memperbarui data terkait kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan teori menurut Steers (2015) [18] menyatakan Adaptasi bisa diartikan sebagai kemampuan individu maupun organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi yang terjadi di sekitarnya. Dalam konteks teori efektivitas, adaptasi memegang peran penting dalam pencapaian tujuan secara optimal. Bagi organisasi, adaptasi mencakup proses penyesuaian terhadap dinamika lingkungan, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Faktor-faktor tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat efektivitas penerapan **SIKS-NG** dalam pengelolaan data kemiskinan.

Program aplikasi SIKS-NG dapat dikatakan efektif apabila sumber daya manusia, dalam hal ini operator di tingkat kelurahan, mampu menjalankan aplikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, seperti perangkat komputer serta data pendukung mengenai warga miskin atau kurang mampu. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Haromin & Andriyansah (2022) dengan judul “*Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*” [12] menyatakan bahwa efektivitas penerapan e-government melalui aplikasi SIKS-NG sebagai sistem pengolah data kemiskinan dapat dilihat dari aspek adaptasi. Program SIKS-NG dinilai mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat desa, khususnya masyarakat menengah ke bawah, karena tujuan utamanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Dari aspek sumber daya manusia, efektivitas juga tercermin dalam kemampuan operator yang memahami penggunaan komputer dan menguasai aplikasi SIKS-NG dengan baik, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai prosedur.

Namun demikian, dari segi sarana dan prasarana, pelaksanaan program SIKS-NG masih dirasa kurang maksimal akibat minimnya perhatian terhadap fasilitas pendukung. Dalam aspek pencapaian tujuan, bantuan sosial yang disalurkan melalui SIKS-NG telah menyesuaikan dengan data masyarakat kurang mampu yang tersedia. Namun, efektivitasnya belum optimal karena proses pendataan belum dilakukan secara langsung di lapangan. Sementara itu, dalam aspek integrasi, pemerintah desa telah berupaya melakukan sosialisasi dengan melibatkan Kepala Dusun, RW, dan RT agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, pemahaman masyarakat terkait fungsi aplikasi SIKS-NG masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi dari pihak desa.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adaptasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan yaitu DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial. Untuk mengecek status penerima bansos, masyarakat Kelurahan Sidokare dapat menggunakan situs [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id). Masyarakat di Kelurahan Sidokare juga dapat menggunakan SIKS-NG untuk mendaftar bansos dan memperbarui data terkait kemiskinan.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektifitas Aplikasi SIKS-NG Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Kemiskinan di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo**

### **1. Faktor Pendukung**

Dalam konteks penerapan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) di kelurahan, faktor pendukung efektivitas mencakup kombinasi antara dukungan manusia, teknologi, dan proses yang memungkinkan sistem bekerja optimal dalam menghasilkan data kemiskinan berkualitas. Pertama, sosialisasi yang efektif dan pelatihan berulang bagi operator kelurahan menjadi sangat krusial, tanpa pelatihan dan pembinaan teknis, operator sering kesulitan memahami mekanisme input, verifikasi, dan pengusulan data dalam sistem. Kedua, infrastruktur yang memadai seperti perangkat komputer, koneksi internet stabil, dan panduan operasional penting untuk memastikan penggunaan aplikasi berjalan lancar serta meminimalkan hambatan teknis. Ketiga, monitoring dan evaluasi rutin oleh Dinas Sosial atau pemerintah kabupaten/kota serta kolaborasi lintas lembaga memperkuat akuntabilitas dalam proses validasi dan verifikasi data. Dalam praktiknya, kemitraan dengan LSM lokal dan pelibatan kader komunitas turut meningkatkan akurasi data hingga 20 % melalui pendekatan partisipatif. Secara keseluruhan, efektivitas SIKS-NG di kelurahan sangat tergantung pada tiga pilar utama: sosialisasi dan kapasitas operator, dukungan teknis infrastrukturnya, serta

pengawasan operasional yang berkelanjutan. Ketiganya saling melengkapi agar sistem mampu menghasilkan data kemiskinan yang valid, mutakhir, dan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare adalah keberadaan operator khusus di tingkat kelurahan. Keberadaan operator ini mempermudah masyarakat dalam mengajukan usulan atau melakukan pengecekan data secara rutin. Masyarakat cukup datang ke kantor kelurahan dengan membawa dokumen pendukung, seperti Kartu Keluarga. Hal ini disampaikan langsung oleh operator aplikasi SIKS-NG yang bertugas di Kelurahan Sidokare.

*“Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya saya sebagai operator aplikasi SIKS-NG di tingkat kelurahan memudahkan masyarakat yang akan mengajukan usulan atau akan memeriksa data secara berkala karena dapat mengunjungi kelurahan dengan hanya membawa KK”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Pernyataan dari operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare di atas didukung oleh pernyataan dari user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

*“Data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang bisa digunakan oleh Kementerian/lembaga terkait untuk menangani kemiskinan agar pemberian bantuan tepat sasaran”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Kedua pernyataan di atas juga senada dengan pernyataan dari warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat sebagai berikut:

*“Adanya aplikasi SIKS-NG memudahkan saya ketika mengajukan usulan atau akan memeriksa data secara berkala karena dapat mengunjungi kelurahan dengan hanya membawa KK”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare, user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat di atas dapat diketahui bahwa faktor pendukung efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu pada aplikasi SIKS-NG di tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang akan mengajukan usulan atau akan memeriksa data secara berkala karena dapat mengunjungi kelurahan dengan hanya membawa dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga. Selanjutnya data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh Kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan agar pemberian bantuan tepat sasaran.

Penelitian Zebua, Hulu, Waruwu, dan Mendrofa (2024) menyatakan bahwa penerapan aplikasi SIKS-NG secara umum mudah beradaptasi dengan kondisi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, karena aplikasi ini mempermudah proses pendataan penerima bantuan. Namun, efektivitas penerapan masih menghadapi kendala, terutama dari sisi sarana dan prasarana, seperti seringnya pemadaman listrik dan koneksi internet yang tidak stabil. Penggunaan aplikasi juga terbatas pada waktu tertentu, sehingga membatasi fleksibilitas dalam pendataan. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa masih kurang maksimal, sehingga pemahaman masyarakat terhadap proses pengusulan data baru belum optimal. Kendala teknis seperti gangguan sistem atau aplikasi yang tidak dapat dibuka saat jaringan bermasalah turut menjadi hambatan dalam proses pengolahan data kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari dinas sosial untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pelayanan aplikasi SIKS-NG di tingkat desa.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu: (a) Faktor pendukung yaitu pada aplikasi SIKS-NG di tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan atau memeriksa data secara berkala bisa mendatangi kelurahan dengan hanya membawa dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga.

## 2. Faktor Penghambat

Dalam kaitannya dengan efektivitas aplikasi SIKS-NG, faktor penghambat efektivitas mencakup kendala teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang menghalangi sistem dalam menghasilkan data kemiskinan yang valid dan tepat sasaran. Secara struktural, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta operator kelurahan menyebabkan pemahaman terhadap mekanisme DTKS dan proses verifikasi data menjadi rendah, sehingga operator sering kali melakukan input data secara asal-asalan tanpa panduan cukup. Selain itu, tingginya tingkat inkonsistensi data kependudukan seperti NIK tidak sinkron antara Disdukcapil dan aplikasi SIKS-NG menjadi hambatan besar karena menyebabkan usulan data sering dikembalikan oleh pusat atau tidak tervalidasi. Faktor teknis lainnya meliputi bug atau gangguan sistem pada aplikasi SIKS-NG serta ketiadaan mekanisme perbaikan cepat, yang mengakibatkan proses input data dan

pemutakhiran terhambat. Di samping itu, ketidaksiapan operator baik dari segi kompetensi maupun frekuensi pembinaan memicu rendahnya pemanfaatan sistem secara optimal, apalagi ketika operator belum paham tata cara pengoperasian serta terminologi DTKS. Secara keseluruhan, kombinasi antara kurangnya sosialisasi, lemahnya validasi data adminuk, persoalan teknis sistem, dan keterbatasan kapabilitas operator menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan maksimal SIKS-NG dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan di kelurahan.

Faktor penghambat terkait efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yang pertama adalah jadwal adanya verifikasi faktual tidak sesuai dengan aplikasi, terkadang dashboard tersebut muncul kadang juga tidak. Kedua yaitu ketika pengusulan selalu ada maintenance sehingga usulan tersebut kadang hilang. Dan yang ketiga yaitu petugas Kelurahan Sidokare sulit untuk mengetahui hasil diterima atau tidaknya pengusulan records sehingga petugas harus melakukan pengecekan, misalnya pada Kartu Indonesia Sehat (KIS), petugas harus melakukan pengecekan pada helpdesk BPJS. Hal ini disampaikan oleh operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare sebagai berikut:

*“Terdapat 3 faktor penghambat terkait efektivitas aplikasi SIKS-NG yang meliputi: jadwal adanya verifikasi faktual tidak sesuai dengan aplikasi, kadang dashboard tersebut muncul kadang juga tidak; ketika pengusulan selalu ada maintenance sehingga usulan tersebut kadang hilang; dan petugas Kelurahan Sidokare sulit untuk mengetahui hasil diterima atau tidaknya pengusulan records sehingga petugas harus melakukan pengecekan, misalnya pada KIS, petugas harus melakukan pengecekan pada helpdesk BPJS”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Pernyataan dari operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare di atas didukung oleh pernyataan dari user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

*“Faktor penghambatnya jadwal adanya verifikasi faktual tidak sesuai dengan aplikasi, kadang dashboard tersebut muncul kadang juga tidak. Namun bansos yang diberikan kepada masyarakat telah terprogram mulai dari tahap pengusulan sampai dengan tahap pemberhentian melalui aplikasi SIKS-NG”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Kedua pernyataan di atas juga senada dengan pernyataan dari warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat sebagai berikut:

*“Faktor penghambatnya yaitu petugas Kelurahan sulit untuk mengetahui hasil diterima atau tidaknya pengusulan records”* (Hasil wawancara 27 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare, user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan warga Kelurahan Sidokare yang tergolong miskin selaku penerima manfaat di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat terkait efektivitas SIKS-NG dalam pemutakhiran DTKS di Kelurahan Sidokare yang pertama adalah jadwal adanya verifikasi faktual tidak sesuai dengan aplikasi, terkadang dashboard tersebut muncul kadang juga tidak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bu Sur selaku user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk memverifikasi bansos (bantuan sosial) PKH menjelaskan bahwa bansos yang diberikan kepada masyarakat telah terprogram mulai dari tahap pengusulan sampai dengan tahap pemberhentian melalui aplikasi SIKS-NG. Berikut ini adalah dashboard jadwal verifikasi faktual pada aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare :

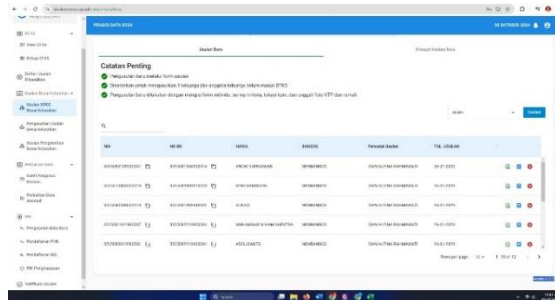
No	No KK	Nama	Status	Pemeriksaan	Tgl. Verifikasi
00000000000000000000	000000000000000000	ANWAR KURNIAWAN	VERIFIKASI	DAFTAR VERIFIKASI	26-07-2023
00000000000000000000	000000000000000000	YUSUF KURNIAWAN	VERIFIKASI	DAFTAR VERIFIKASI	26-07-2023
00000000000000000000	000000000000000000	YUSUF KURNIAWAN	VERIFIKASI	DAFTAR VERIFIKASI	26-07-2023
00000000000000000000	000000000000000000	YUSUF KURNIAWAN	VERIFIKASI	DAFTAR VERIFIKASI	26-07-2023
00000000000000000000	000000000000000000	YUSUF KURNIAWAN	VERIFIKASI	DAFTAR VERIFIKASI	26-07-2023

**Gambar 4.** Dashboard Jadwal Verifikasi Faktual Pada Aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare

Berdasarkan gambar dashboard jadwal verifikasi faktual pada aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare di atas, berdasarkan Surat Edaran 928/10/DI.02/3/2024 perihal perubahan waktu layanan pada aplikasi SIKS-NG yang semula hanya dapat diakses pada pukul 10.00-20.00 WIB, maka mulai tanggal 1 April 2024 akses pemadanan data kependudukan dapat digunakan selama 24 jam. Modul dalam SIKS-NG yang menggunakan akses tersebut akan menyesuaikan antara lain: perbaikan data anomali, usulan bansos/DTKS, pengusulan data baru PBI, view BNBA-pemadanan ulang, ganti pengurus bansos, dan create user operator daerah. Pada usulan DTKS Desa/Kelurahan memiliki catatan penting yaitu: pengusulan baru melalui form usulan, disarankan untuk mengusulkan 1 keluarga jika anggota keluarga belum masuk DTKS, dan pengusulan baru dilakukan

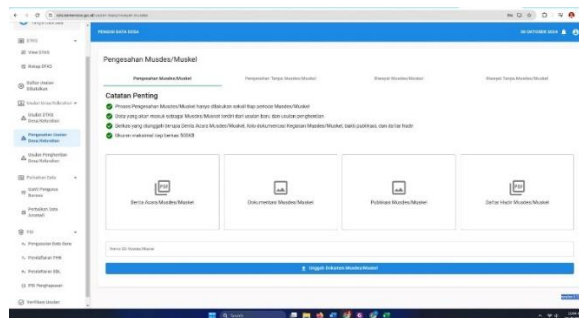
dengan mengisi form individu, survei kriteria, lokasi kpm, dan unggah foto KTP dan rumah. Pada identitas warga meliputi: NIK, nomor KK, nama, bansos, pencatat usulan, dan tanggal usulan. Pada gambar di atas tertera bahwa pada PKH memiliki alokasi sebanyak 144 orang, dengan realisasi sebanyak 158 orang. Sedangkan pada sembako memiliki alokasi sebanyak 284 orang, realisasi sebanyak 265 orang, dan daftar tunggu sebanyak 5 orang

Faktor penghambat kedua yaitu ketika pengusulan selalu ada maintenance sehingga usulan tersebut kadang hilang. Berikut ini adalah dashboard form usulan dan form pengesahan pada aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare



**Gambar 5.** Dashboard Form Usulan Pada Aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare

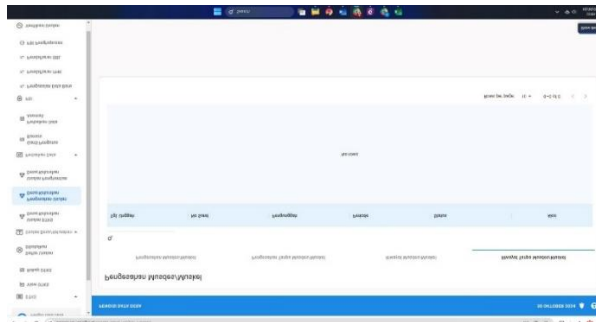
Berdasarkan gambar di atas, pada usulan DTKS Desa/Kelurahan memiliki catatan penting yaitu: pengusulan baru melalui form usulan, disarankan untuk mengusulkan 1 keluarga jika anggota keluarga belum masuk DTKS, dan pengusulan baru dilakukan dengan mengisi form individu, survei kriteria, lokasi kpm, dan unggah foto KTP dan rumah. Pada identitas warga meliputi: NIK, nomor KK, nama, bansos, pencatat usulan, dan tanggal usulan



**Gambar 6.** Dashboard Form Pengesahan Pada Aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare

Berdasarkan gambar di atas, pada pengesahan usulan desa/kelurahan pada pengesahan Musdes/Muskel memiliki catatan penting yaitu: Proses pengesahan Musdes/Muskel hanya dilakukan sekali tiap periode Musdes/Muskel, Data yang akan masuk sebagai Musdes/Muskel terdiri dari usulan baru dan usulan penghentian, Berkas yang diunggah berupa Berita Acara Musdes/Muskel, foto dokumentasi kegiatan Musdes/Muskel, bukti publikasi, dan daftar hadir, dan Ukuran maksimal tiap berkas yaitu 500KB

Faktor penghambat ketiga yaitu petugas Kelurahan Sidokare sulit untuk mengetahui hasil diterima atau tidaknya pengusulan records sehingga petugas harus melakukan pengecekan, misalnya pada Kartu Indonesia Sehat (KIS), petugas harus melakukan pengecekan pada helpdesk BPJS. Berikut ini adalah dashboard riwayat usulan pada aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare :



**Gambar 7.** Dashboard Riwayat Usulan Pada Aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare

Pada gambar di atas terlihat bahwa pada pengesahan usulan Desa/Kelurahan yaitu pengesahan Musdes/Muskel meliputi keterangan: tanggal unggah, nomor surat, pengunggah, periode, status, dan aksi.

Namun tidak ada data yang tertera pada pengesahan Musdes/Muskel pada aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare di atas. Faktor penghambat keempat yaitu prosedur baru dan daftar pengusulan program selalu terlambat disampaikan kepada petugas desa sehingga petugas Kelurahan Sidokare kadang kebingungan dalam melakukan pengusulan program. Hal ini sama halnya seperti jadwal verifikasi dan ditambah juga apabila terdapat perubahan kolom atau dashboard terkait dengan pemberhentian yang juga berubah-ubah yang tidak diketahui oleh petugas Kelurahan Sidokare

Penelitian Faiza, Radjikan, dan Santoso (2022) menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG GIS di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai kendala. Proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi ini kerap terkendala oleh ketidaksesuaian antara data lapangan dan data yang tercantum dalam DTKS, terutama terkait banyaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. Kondisi ini menghambat proses pendistribusian bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat serta political will dari aparat pelaksana di lapangan agar proses verifikasi dan validasi dapat berjalan optimal. Selain peningkatan kualitas aplikasi SIKS-NG GIS sebagai alat pemutakhiran data, juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tidak terjadi hambatan teknis akibat kurangnya penguasaan teknologi informasi.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yaitu jadwal verifikasi faktual tidak sesuai dengan aplikasi, kadang dashboard tersebut muncul namun kadang juga tidak muncul; saat pengusulan selalu terdapat maintenance sehingga usulan tersebut terkadang hilang; petugas Kelurahan Sidokare kesulitan untuk mengetahui hasil diterima atau tidak diterimanya pengusulan records sehingga petugas harus melakukan pengecekan, contohnya pada Kartu Indonesia Sehat (KIS), petugas harus mengecek helpdesk BPJS; dan prosedur baru dan daftar pengusulan program selalu mengalami keterlambatan penyampaian kepada petugas desa sehingga petugas Kelurahan Sidokare terkadang kebingungan dalam melakukan pengusulan program.

## V. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare memiliki efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan. Hal ini ditunjukkan melalui tiga aspek utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pertama, dari segi pencapaian tujuan, implementasi SIKS-NG diharapkan mampu menghasilkan data kesejahteraan sosial yang valid dan tepat sasaran. Kedua, dari aspek integrasi, aplikasi ini telah digunakan oleh operator khusus di tingkat kelurahan untuk melakukan input, pembaruan, serta verifikasi dan validasi data kemiskinan. Masyarakat dapat mengajukan usulan atau memeriksa data dengan membawa dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga ke kantor kelurahan. Ketiga, dari segi adaptasi, aplikasi SIKS-NG telah terhubung dengan DTKS sebagai data induk, serta memungkinkan masyarakat mengakses informasi bantuan sosial melalui situs resmi atau mendaftar langsung menggunakan aplikasi. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan aplikasi ini. Faktor pendukung utamanya adalah keberadaan operator khusus yang memfasilitasi proses pengelolaan data secara langsung. Namun, faktor penghambat seperti gangguan teknis pada sistem aplikasi, ketidaksesuaian jadwal verifikasi faktual, hilangnya data usulan saat maintenance, serta keterlambatan informasi prosedur baru menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program ini.

Saran peneliti yaitu, upaya untuk meningkatkan efektivitas aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan. Pertama, operator aplikasi disarankan untuk menggunakan jaringan internet yang stabil, seperti wifi dengan koneksi yang kuat, guna menghindari gangguan teknis saat mengakses sistem. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi secara rinci dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait prosedur pengusulan data baru, agar partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengelolaan data kemiskinan dapat meningkat. Ketiga, dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara operator SIKS-NG di kelurahan, user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, serta petugas desa, terutama dalam menyikapi perubahan prosedur dan pembaruan daftar pengusulan program, agar proses pengelolaan data dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama proses penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya yang senantiasa membimbing setiap langkah dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepadadosen pembimbing dan dosen penguji Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang

telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang konstruktif sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Penghargaan yang sebesar-besarnya juga diberikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan dorongan semangat selama proses penulisan. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa serta operator aplikasi SIKS-NG di Desa Sidokare yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan turut memberikan dukungan serta informasi penting yang sangat membantu kelancaran proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner terkait penelitian. Selain itu, apresiasi diberikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- [1] Dinsos, "Panduan Daftar DTKS 2024 dan Manfaatnya," Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Accessed: Dec. 04, 2024. [Online]. Available: [https://dinsos.lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-panduan-daftar-dtk-2024-dan-manfaatnya.html#:~:text=Data Terpadu Kesejahteraan Sosial \(DTKS,mendaftar%2C simak panduan berikut ini.](https://dinsos.lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-panduan-daftar-dtk-2024-dan-manfaatnya.html#:~:text=Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS,mendaftar%2C simak panduan berikut ini.)
- [2] Kemensos, *User Guide SIKS-NG Modul DTKS (Pengisi Data Desa/Kelurahan)*. Jakarta: Kementerian Sosial, 2024.
- [3] UGM, "Benarkah Kemiskinan di Indonesia Berhasil Capai Target Nol Persen," PKP Pasca UGM. Accessed: Dec. 04, 2024. [Online]. Available: <https://pkp.pasca.ugm.ac.id/2024/08/12/benarkah-kemiskinan-di-indonesia-berhasil-capai-target-nol-persen/#:~:text=Di Tahun 2023%2C Badan Pusat,selisih sekitar 2-3%25.>
- [4] E. Purwanti, "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023," *J. Mhs. Humanis*, vol. 4, no. 1, 2024.
- [5] Sekkab, "Melalui Aplikasi SIKS-NG, Kemensos Siapkan Data Kemiskinan Yang Akurat dan Aktual," Sekretariat Kabinet RI. [Online]. Available: <https://setkab.go.id/melalui-aplikasi-siks-ng-kemensos-siapkan-data-kemiskinan-yang-akurat-dan-aktual/>
- [6] M. L. Prayoga, Muchtolifah, and Sishadiyanti, "Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo," *Jambura Econ. Educ. J.*, vol. 3, no. 2, 2021.
- [7] S. Andriyani, "Analisis Efektifitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," Universitas Indonesia, 2019.
- [8] E. Ramadan, I. Nurlatifah, I. R. Shangadah, S. E. Ginanjar, and R. Santa, "Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS," *J. Sos. Dan Teknol. SOSTECH*, vol. 4, no. 2, 2024.
- [9] A. C. Yosephine and Tukiman, "Efektivitas Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) Sebagai Pelayanan Publik Di Desa Gempolsari Kabupaten Sidoarjo," *J. Publicuho*, vol. 7, no. 2, pp. 449–461, 2024.
- [10] S. H. Cahyono and Y. G. Suchyo, "Pengukuran Kualitas Data Menggunakan Framework Total Data Quality Management (Tdqm): Studi Kasus Sistem Informasi Beasiswa Universitas Indonesia," *J. Iptek-Kom J. Ilmu Pengetah. Dan Teknol. Komun.*, vol. 22, no. 2, pp. 193–206, 2020.
- [11] D. E. A. Zebua, F. Hulu, F. Waruwu, and M. S. D. Mendrofa, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 2, 2024.
- [12] Haromin and D. Andriyansah, "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung," *J. JISI POL Ilmu Pemerintah. Univ. Bale Bdg.*, vol. 6, no. 3, pp. 34–56, 2022.
- [13] N. R. Faiza, Radjikan, and T. Santoso, "Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)," *Semin. Nas. 2022 Transform. Digit. Dalam Upaya Peningkatan Perekon. Pasca Pandemi*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [14] D. Purnamawati, Suyeno, and H. Anadza, "Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)," *J. Respon Publik*, vol. 16, no. 6, pp. 11–18, 2022.
- [15] F. Wati, J. N. Utamajaya, and A. Pratama, "Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM," *JURIKOM J. Ris. Komput.*, vol. 9, no. 2, p. 493–498, 2022.
- [16] M. Abdurahman, M. Safi, and M. Abdullah, "Sistem Informasi Pengolahan Data Balita Berbasis Website Pada Kantor Upt-Kb Kec. Ternate Selatan," *Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–8, 2021.

- [17] A. V Setya and Sarurama, *Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Pppa Kabupaten Banjarnegara*. Jatinangor: IPDN, 2024.
- [18] M. R. Steers, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [20] S. Ramaila and A. J. Molwele, "The Role of Technology Integration in the Development of 21st Century Skills and Competencies in Life Sciences Teaching and Learning," *Int. J. High. Educ.*, vol. 11, no. 5, pp. 9–17, 2022.
- [21] M. Yaumi and M. Damopolii, "Model Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh," *Al-Musannif*, vol. 1, no. 2, pp. 138–150, 2019.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*